

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu didasari dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Interaksi komunikasi ini dapat dilakukan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, hal seperti ini selalu dilakukan oleh manusia setiap hari. Dari komunikasi ini, manusia dapat mendapatkan informasi dengan mudah.¹ Lingkup komunikasi juga dapat menembus dengan dimensi politik. Komunikasi politik sendiri memiliki pengertian sebagai komunikasi yang ditujukan pada pencapaian tujuan ini, dapat digunakan untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang ada di masyarakat. Proses komunikasi politik peyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang, lembaga, atau kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik.²

Calon legislatif sebagai peserta pemilu hendaknya memperhatikan faktor pendorong yang mampu mendongkrak suara pemilih untuk memilihnya. Memiliki modal dianggap perlu oleh para calon legislatif di pemilu. Umumnya ada tiga modal yang dipakai calon legislatif dalam pemilu, salah satunya modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi.

Pertama, Modal politik ini dimiliki calon legislatif dari proses membangun jaringan dengan elit politik atau organisasi. Dengan memiliki modal politik salah satunya mempunyai peluang kekuasaan/ sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan. Kekuatan modal politik sebagai dasar pertimbangan keterpilihan Modal politik bagi calon legislatif tidak hanya dari dukungan partai politik, melainkan dukungan elit-elit politik baik lokal maupun pusat, jaringan organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. calon legislatif di pemilihan umum.

¹ Liliweri, Alo, "*Strategi Komunikasi Masyarakat*", Yogyakarta : PT LKIS Printing Cemerlang, 2010, hal 59

² Rosiana Eka Putri, "Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis)", *Jurisprudence*, Vol, 5 No.1 Maret 2015 : 52, diakses pada 3 Februari 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4221/2697>

Kedua, Modal Sosial adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Modal sosial bagi calon legislatif dari sejauh mana modal legislatif 7 mampu meyakinkan para pemilih bahwa ia memang layak untuk mewakili modal ekonomi daerahnya.

Ketiga, bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut Umanailo modal politik dianggap lebih dominan karena masyarakat telah terbentuk dengan logika konsumtif, pendekatan politik lebih ke pragmatisme, tumbuhnya kesadaran semu yang menciptakan masyarakat tanpa identitas. Kemudian hal tersebut membuka ruang yang besar kepada modal ekonomi menjadi dominasi modal atas ranah politik.

Dalam komunikasi politik ini terdapat retorika dan penyampaian pesan dalam politik, seperti halnya dengan kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang telah terjadi di seluruh Indonesia, dapat diamati oleh berbagai aspek dalam komunikasi politik. Dalam aspek ini, memiliki peran tersendiri, walaupun tetap mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapannya. Komponen dalam komunikasi politik ini meliputi 5 hal, diantaranya komunkator politik, pesan politik, media yang digunakan, khalayak, dan akibat yang ditimbulkan.

Penyampaian pesan dalam komunikasi politik ini memiliki strategi persuasi sebagai teknik penyampaian pesan melalui kampanye, propaganda, dan penggalangan opini publik. Strategi persuasi ini memiliki arti luas sebagai alat yang digunakan oleh kelompok partai tersebut, untuk dapat menjangkau individu secara psikologis dimanapun dalam organisasi. Tidak hanya melalui kampanye, propaganda, dan penggalangan opini publik saja, penyebaran pesan politik ini juga dilakukan melalui iklan politik yang sasarannya kepada kelompok massa yang heterogen dan retorika sebagai bentuk komunikasi dalam gaya kepemimpinan untuk mendapatkan manfaat timbal balik.³

Dalam penetapan peraturan Perundang-undangan, komunikasi politik antar sesama anggota pasti terjadi. Masing-masing anggota Partai memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang sama. Dalam melaksanakan komunikasi Politik harus

³ Ibid, hal : 52

benar-benar melihat apa yang menjadi prioritas masyarakat saat ini, karena setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk, membutuhkan dana yang cukup besar, baik berasal dari APBN ataupun sumber lainnya. Sehingga sumber dana berharap agar dapat melaksanakan peraturan perundangan yang dibuat dengan sebaik mungkin. Untuk itu, agar penerapan komunikasi politik bisa berlangsung, sebab perumusan perumusan peraturan perundangan tersebut melibatkan beberapa komisi, yang didalamnya terdapat beberapa fraksi, masing-masing fraksi memiliki berbagai latar belakang kepartaian, sehingga dapat memunculkan potensi berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing individu dalam anggota dewan yang bersumber dari kepentingan partai.⁴

Untuk menyesuaikan kepentingan yang beragam, maka dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPRD yang memiliki pandangan politik sejalan. Fraksi ini merupakan kelompok yang terdiri atas beberapa anggota dewan yang separtai dan sependirian, yang biasanya dalam satu partai yang sama. Seperti halnya dengan penelitian ini akan meneliti tentang Di Indonesia fungsi komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Pada Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengungkapkan, menganalisa fungsi komunikasi partai politik, peranan DPRD Kudus dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai aktor yang memperjuangkan dan aspirasi masyarakat serta menganalisis mekanisme penyerapan aspirasi dalam bentuk program kerja atau kegiatan pembangunan oleh anggota calon yang terpilih di DPRD Kabupaten Kudus. Untuk dapat, mengungkapkan secara faktual dan akurat objek penelitian digunakan metode diskriptif. Metode diskriptif adalah metode yang mencoba untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan dua gejala atau lebih. Dalam analisis mendalam fenomena sosial yang ada anggota DPRD sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD yang terpilih di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan dalam konteks merupakan salah satu faktor pendorong keterpilihan melakukan kerja politik membangun jaringan dan

⁴ Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America* (Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media), Terjemahan Tjun Surjaman, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hal : 8

berkomunikasi dengan konstituennya. jaringan paling utama dari partai pengusung, dilanjut dengan jaringan kekerabatan dari sanak saudara, jaringan teman dekat dan jaringan elit politik. Jaringan elit politik ini sangat membantu keterpilihan Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2019.

Dibalik keterpilihan Calon tentang jaringan kekerabatan dengan elit politik mendominasi basis keterpilihan Calon . Jaringan kekerabatan dengan elit politik mencakup hubungan kekeluargaan melalui pernikahan serta anak-anak dan saudara, yang awalnya ditolak, kemudian di pertimbangkan dan akhirnya diterima. Upaya yang dilakukan Anggota DPRD dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjaring Aspirasi Rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan prioritas kegiatan pembangunan kedepan, Anggota Calon terpilih DPRD kabupaten kudus mengadakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi Fraksi dalam menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses, di mana masa reses anggota DPRD masih dirasakan singkat, jadwal kegiatan anggota DPRD reses biasanya berbenturan dengan acara-acara yang mendadak yang harus dihadiri sehingga waktu resesnya terganggu, kemudian masalah dana terbatas, karena dalam kunjungan reses kelapangan memang sudah dibatasi dalam, perencanaan anggaran sehingga tidak menutup kemungkinan waktu, untuk reses kelapangan kurang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terkait, terdapat permasalahan yang mendasari adanya peran komunikasi terhadap masyarakat dalam menyerap aspirasi, yaitu. Bagaimana strategi komunikasi politik anggota Partai Amanat Nasional DPRD Kudus dalam menyerap aspirasi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk strategi komunikasi politik anggota Partai Amanat Nasional DPRD Kudus dalam menyerap aspirasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran komunikasi politik kepada masyarakat
 - b. Penelitian ini bisa menjadi penelitian lebih sekedar topik dengan mencari kekurangan dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan guna penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Pada Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam pengetahuan tentang peran anggota partai yang berkomunikasi kepada masyarakat, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik, mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang membahas tentang komunikator politik, atau bisa saja disebut peran anggota partai dalam menyerap aspirasi masyarakat. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis ini menjelaskan bagaimana metode atau urutan dalam menyelesaikan penelitian. yang termasuk dalam sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yang membahas mengenai Strategi Komunikasi Politik Anggota Partai Amanat Nasional dalam Menyerap Aspirasi, pembahasan penelitian meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi teori yang menjelaskan segala pembahasan yang menyangkut tentang penelitian yang meliputi, Teori tentang strategi politik, Teori Komunikasi Politik, Teori Partai Politik, yang meliputi Penjelasan Komunikasi politik, kampanye politik, dan beserta propaganda saat melakukan kampanye politik, Kerangka Berfikir, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan, Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang berbagai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang meliputi, Gambaran Objek Penelitian tentang profil Partai Amanat Nasional, Deskripsi Penelitian yang berisi tentang Partai Amanat Nasional dalam menyerap aspirasi di kabupaten kudus dalam Pemilu.

BAB V : Penutup,

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi keseluruhan penelitian yang dikaji dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh Penulis kepada pembaca untuk menyelesaikan masalah Penelitian